



BAB II

KINERJA DAN PROSPEK EKONOMI NASIONAL: OPTIMIS DAN WASPADA

Sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dapat menopang berlanjutnya proses pemulihan perekonomian nasional pada 2022, di tengah kondisi perekonomian global yang menurun. Pertumbuhan ekonomi pada 2022 diperkirakan bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3% serta didukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi pada 2023 diperkirakan tetap kuat, meskipun sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5-5,3% sejalan penurunan prospek pertumbuhan ekonomi dunia, sebelum kemudian meningkat kembali menjadi 4,7-5,5% pada 2024.



Sinergi kebijakan kuat Bank Indonesia, Pemerintah, dan KSSK telah menopang berlanjutnya pemulihan ekonomi pada 2022 dengan ditopang stabilitas ekonomi yang terjaga. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,5-5,3% dengan kecenderungan bias atas didorong ekspor yang tetap kuat seiring dengan besarnya permintaan beberapa mitra dagang utama serta dukungan kebijakan Pemerintah. Stabilitas eksternal tetap terjaga, didukung Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang tetap sehat, sejalan dengan surplus transaksi berjalan di tengah tekanan pada transaksi modal dan finansial, khususnya investasi portofolio. Kinerja NPI yang tetap baik serta respons segera Bank Indonesia berkontribusi dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, meskipun kondisi global ditandai ketidakpastian pasar keuangan. Inflasi meski lebih tinggi dari kisaran sasaran 2022 pascakenaikan harga BBM bersubsidi, tercatat lebih rendah dari proyeksi awal dan diperkirakan akan kembali ke sasaran pada paruh pertama 2023. Stabilitas sistem keuangan juga tetap baik dengan ketahanan yang terjaga dan fungsi intermediasi yang meningkat.

Pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan berlanjut dalam jangka pendek dan terus menguat dalam jangka menengah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan tetap kuat dan optimis

dalam kisaran 4,5-5,3%, meskipun sedikit melambat dipengaruhi perlambatan ekonomi global. Stabilitas eksternal tetap terjaga ditopang oleh kinerja NPI yang tetap sehat. Inflasi juga kembali terkendali ke sasarannya $3,0 \pm 1\%$. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan tetap baik. Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia terus meningkat dan kembali berada di lintasan menuju Indonesia Maju. Prospek ini didukung oleh pemulihan perekonomian global yang berlanjut serta peningkatan perekonomian domestik yang juga didorong oleh kenaikan investasi dan produktivitas seiring dengan implementasi kebijakan reformasi struktural, baik di sektor riil maupun akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Bank Indonesia memprakirakan dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat hingga berada pada kisaran 5,0-5,8% pada 2027. Inflasi diperkirakan tetap terjaga pada kisaran 1,5-3,5%, didukung oleh peningkatan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Defisit transaksi berjalan diperkirakan juga tetap terkendali pada level yang sehat dalam kisaran 1,2-2,0% dari PDB, sehingga menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Secara keseluruhan, dengan lintasan prospek tersebut, Indonesia diperkirakan mampu menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2047.

2.1

Perbaikan Berlanjut di Tengah Perlambatan Ekonomi Global

Di tengah gejolak ekonomi global, perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada 2022 seiring dengan kenaikan mobilitas masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 diperkirakan bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%. Perekonomian wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) diperkirakan tumbuh masing-masing pada kisaran 4,2-5,0%, 5,0-5,8%, 3,8-4,6%, 4,5-5,3%, dan 6,9-7,7% untuk keseluruhan tahun 2022.

Momentum perbaikan ekonomi domestik sudah menguat sejak triwulan I 2022. Hal sebagaimana tecermin pada pertumbuhan sebesar 5,02% (yoy), sama dengan capaian triwulan IV 2021. Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan tetap terjaganya kinerja ekspor. Kuatnya permintaan domestik terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang terus membaik sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi. Sementara itu, kinerja positif ekspor ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat, di tengah masih terbatasnya dampak ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Perbaikan ekonomi nasional tersebut terjadi pada mayoritas lapangan usaha serta seluruh wilayah.

Perbaikan kinerja ekonomi domestik berlanjut pada triwulan II 2022, meskipun risiko pelemahan ekonomi dan kenaikan tekanan inflasi global terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2022 mencapai 5,45% (yoy), jauh lebih tinggi dari prakiraan dan capaian triwulan sebelumnya. Capaian positif tersebut didukung oleh peningkatan permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, serta tetap tingginya kinerja ekspor. Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi sebesar 5,51% (yoy) didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan makin longgarnya kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas terkait perayaan Hari Besar Keagamaan

Nasional (HBKN). Sementara, investasi tumbuh melambat sebesar 3,07% (yoy), disebabkan penurunan investasi bangunan, di tengah kinerja investasi nonbangunan yang tetap baik. Konsumsi Pemerintah berkontraksi sebesar 4,86% (yoy) terutama disebabkan oleh penurunan belanja barang untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja positif ekonomi nasional terutama didukung oleh beberapa LU terutama Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Secara spasial, berlanjutnya perbaikan ekonomi terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi di wilayah Sulampua, diikuti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Balinusra. Peningkatan pertumbuhan di wilayah Sulampua, Kalimantan, dan Sumatera terutama ditopang oleh kinerja ekspor yang solid. Sementara di sebagian besar wilayah lain, terutama Jawa dan Balinusra, kinerja perekonomian didukung oleh perbaikan permintaan domestik seiring peningkatan mobilitas masyarakat.

Aktivitas ekonomi domestik terus menguat pada triwulan III 2022. Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat pada triwulan III 2022 sebesar 5,72% (yoy) ditopang oleh berlanjutnya perbaikan permintaan domestik dan ekspor yang tetap tinggi (Tabel 2.1). Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh tinggi sebesar 5,39% (yoy) didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat kelas menengah dan atas seiring dengan pelonggaran aktivitas, serta penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi untuk menahan dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada kelompok kelas bawah. Sementara itu, konsumsi Pemerintah masih berkontraksi 2,88% (yoy) disebabkan oleh berlanjutnya penurunan belanja barang untuk PC-PEN seiring dengan kondisi pandemi Covid-19 yang tetap terkendali. Pertumbuhan investasi tercatat meningkat menjadi sebesar 4,96% (yoy), didorong oleh investasi nonbangunan, di tengah kinerja investasi bangunan yang masih tertahan. Kinerja positif ekspor terus berlanjut dengan tumbuh

Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran

%, yoy

Komponen	2020	2021				2021	2022		
		I	II	III	IV		I	II	III
Konsumsi Rumah Tangga	-2,63	-2,21	5,96	1,02	3,55	2,02	4,34	5,51	5,39
Konsumsi Pemerintah	1,96	2,55	8,06	0,62	5,25	4,17	-6,94	-4,86	-2,88
Investasi (PMTB)	-4,96	-0,21	7,52	3,76	4,49	3,8	4,09	3,07	4,96
Investasi Bangunan	-3,78	-0,74	4,36	3,36	2,48	2,32	2,58	0,92	0,07
Investasi Nonbangunan	-8,44	1,44	18,5	4,96	10,4	8,42	8,66	9,65	19,24
Ekspor	-8,14	6,94	31,5	29,16	29,83	24,04	16,7	20,02	21,64
Impor	-16,72	4,41	31,84	29,95	29,6	23,31	15,88	12,37	22,98
Produk Domestik Bruto	-2,07	-0,70	7,07	3,51	5,02	3,69	5,02	5,45	5,72

Sumber: BPS

sebesar 21,64% (yoy), terutama ditopang oleh tetap kuatnya permintaan mitra dagang utama. Impor tumbuh tinggi sebesar 22,98% (yoy) sejalan dengan kinerja ekspor dan permintaan domestik yang tetap tinggi.

Perbaikan ekonomi yang terus berlanjut juga tercermin pada kinerja positif hampir seluruh Lapangan Usaha (LU) pada triwulan III 2022.

Pemulihan LU Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, serta Perdagangan Besar dan

Eceran terus berlanjut dan menjadi sumber utama pertumbuhan didukung oleh permintaan domestik yang masih terjaga setelah periode HBKN seiring peningkatan mobilitas dan terjaganya daya beli serta peningkatan permintaan eksternal (Tabel 2.2). Peningkatan LU Pertanian berlanjut terutama ditopang oleh kinerja perkebunan dan perikanan seiring puncak panen dan tingginya harga komoditas perikanan dunia. Sementara LU Konstruksi tumbuh melambat dipengaruhi oleh kenaikan harga energi dan penyesuaian harga BBM.

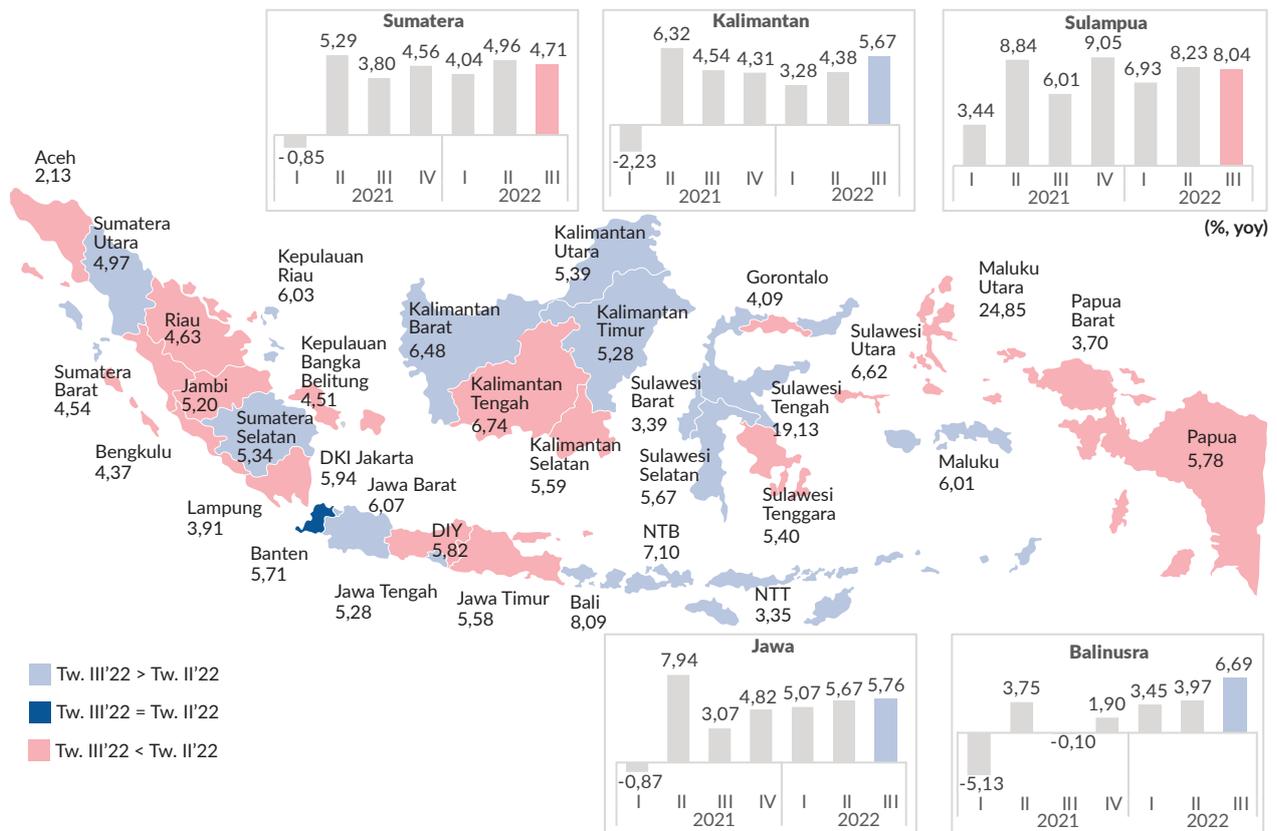
Tabel 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

%, yoy

Komponen	2020	2021				2021	2022		
		I	II	III	IV		I	II	III
Pertanian	1,75	3,44	0,53	1,43	2,28	1,84	1,21	1,38	1,65
Pertambangan dan Penggalian	-1,95	-2,02	5,22	7,78	5,15	4,00	3,82	4,01	3,22
Industri Pengolahan	-2,93	-1,38	6,58	3,68	4,92	3,39	5,07	4,01	4,83
Listrik dan Gas	-2,34	1,68	9,09	3,85	7,81	5,55	7,04	9,33	8,05
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	4,94	5,46	5,78	4,56	4,14	4,97	1,30	4,46	4,25
Konstruksi	-3,26	-0,79	4,42	3,84	3,91	2,81	4,83	1,02	0,63
Perdagangan Besar dan Eceran	-3,72	-1,26	9,52	5,15	5,56	4,65	5,73	4,42	5,35
Transportasi dan Pergudangan	-15,04	-13,09	25,10	-0,72	7,93	3,24	15,79	21,27	25,81
Akomodasi dan Makan Minum	-10,22	-7,27	21,58	-0,14	4,95	3,89	6,56	9,76	17,83
Informasi dan Komunikasi	10,58	8,72	6,90	5,54	6,21	6,81	7,16	8,07	6,88
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,25	-2,97	8,33	4,29	-2,59	1,56	1,64	1,50	0,87
Real Estat	2,32	0,94	2,82	3,42	3,94	2,78	3,78	2,16	0,63
Jasa Perusahaan	-5,44	-6,10	9,94	-0,59	0,89	0,73	5,96	7,92	10,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	-2,26	9,95	-9,95	0,98	-0,33	-1,38	-1,56	12,42
Jasa Pendidikan	2,63	-1,54	5,89	-4,42	0,70	0,11	-1,66	-1,09	4,46
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,60	3,39	11,69	14,06	12,16	10,46	4,50	6,49	-1,74
Jasa Lainnya	-4,10	-5,15	11,97	-0,30	3,35	2,12	8,25	9,26	9,13
Produk Domestik Bruto	-2,07	-0,7	7,07	3,51	5,02	3,69	5,02	5,45	5,72

Sumber: BPS

Grafik 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Spasial Triwulan III 2022



Sumber: BPS

Secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Jawa, dan Kalimantan tumbuh meningkat pada triwulan III 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 6,69% (yoy), 5,76% (yoy), dan 5,67% (yoy)-(Grafik 2.1). Pertumbuhan ekonomi di ketiga wilayah tersebut terutama didukung permintaan domestik seiring dengan mobilitas yang naik, termasuk terkait aktivitas pariwisata. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Balinusra juga turut ditopang kinerja ekspor tembaga dari Nusa Tenggara Barat. Demikian halnya kinerja ekspor Kalimantan yang tetap kuat, terutama CPO dan batu bara. Sementara itu, wilayah Sulawesi dan Sumatera dalam periode yang sama juga tumbuh pada level yang tinggi masing-masing sebesar 8,04% (yoy) dan 4,71% (yoy), kendati sedikit melambat dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut ditopang permintaan domestik dan kinerja ekspor industri berbasis SDA yang tetap kuat.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat didukung oleh peningkatan surplus neraca transaksi berjalan sehingga menopang ketahanan eksternal. Neraca transaksi berjalan pada sembilan bulan pertama tahun 2022 tercatat surplus tinggi sejalan dengan kinerja ekspor yang kuat. Kinerja positif neraca transaksi berjalan tersebut mengurangi tekanan pada NPI akibat penurunan transaksi modal dan finansial yang terutama berasal dari aliran keluar investasi portofolio seiring peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan NPI secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2022 tercatat defisit 0,7 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa akhir Desember 2022 tercatat 137,2 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional.

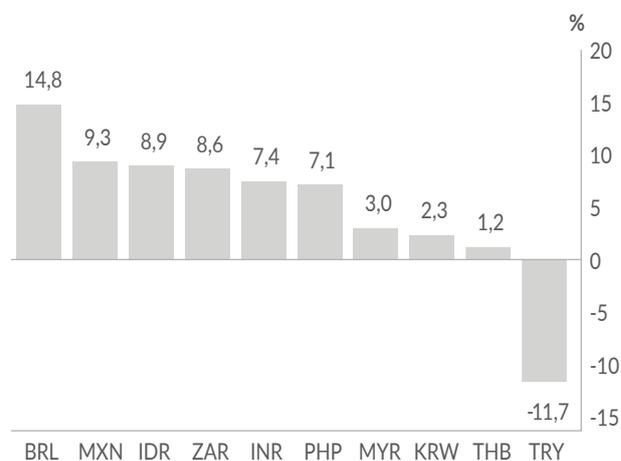
Peningkatan surplus neraca transaksi berjalan didukung ekspor yang kuat di tengah perbaikan aktivitas ekonomi domestik. Surplus neraca transaksi berjalan hingga triwulan III 2022 mencapai 9,0 miliar dolar AS (0,9% dari PDB), jauh melampaui capaian surplus pada periode yang sama tahun sebelumnya

sebesar 2,0 miliar dolar AS (0,2% dari PDB). Perbaikan ini ditopang oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan barang yang lebih besar daripada kenaikan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer. Surplus neraca perdagangan barang meningkat seiring dengan kinerja ekspor yang terus membaik karena lonjakan harga komoditas akibat dampak perang Rusia-Ukraina serta permintaan negara mitra dagang terhadap produk manufaktur dan pertambangan Indonesia yang masih kuat. Di sisi lain, berlanjutnya perbaikan ekonomi yang mendorong permintaan domestik dan tren peningkatan harga minyak dunia berdampak pula pada kenaikan impor. Hal ini pun memengaruhi defisit neraca jasa yang melebar terutama akibat peningkatan pembayaran jasa transportasi, baik dalam bentuk transportasi barang (*freights*) maupun penumpang. Defisit neraca jasa yang lebih dalam tertahan oleh perbaikan surplus jasa perjalanan seiring kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara pascapelonggaran kebijakan bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dan penyelenggaraan berbagai kegiatan internasional, termasuk dalam rangka keketuaan Indonesia di G20 pada 2022. Sementara itu, pembayaran imbal hasil investasi terhadap investor asing meningkat sehingga defisit neraca pendapatan primer melebar sejalan dengan dampak ekspor terhadap perbaikan kinerja korporasi.

Aliran modal keluar investasi portofolio memberikan tekanan pada transaksi modal dan finansial di Neraca Pembayaran. Perkembangan transaksi modal dan finansial pada tiga triwulan awal 2022 tercatat defisit 9,2 miliar dolar AS, berbalik dari surplus 14,8 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun 2021. Ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat berdampak pada arus keluar investasi portofolio asing, terutama SBN, di tengah peningkatan aliran masuk dalam bentuk saham. Defisit transaksi modal dan finansial juga berasal dari transaksi investasi lainnya yang disebabkan oleh penempatan aset swasta pada beberapa instrumen keuangan di luar negeri terkait kebutuhan operasional usaha. Pada saat yang sama, investasi langsung kembali membukukan surplus, mencerminkan optimisme investor asing terhadap prospek perekonomian Indonesia. Iklim investasi yang tetap terjaga mendorong investasi langsung mengalir terutama pada sektor Industri Pengolahan, Lembaga Perantara Keuangan, dan Perdagangan.

Respons segera Bank Indonesia berkontribusi dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah sangat kuatnya dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Berbagai faktor eksternal, antara lain, kenaikan FFR yang agresif, dolar AS yang sangat kuat, dan tingginya persepsi risiko investor global ("*cash is the king*") menyebabkan aliran keluar investasi portofolio dan tekanan pelemahan nilai tukar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk memitigasi dampak rambatan gejolak global ini, Bank Indonesia memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan intervensi di pasar valuta asing dalam jumlah besar, baik secara *spot* maupun *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)*, di samping transaksi SBN di pasar sekunder untuk menjaga imbal hasil SBN tetap menarik bagi investor portofolio asing (Grafik 2.2). Stabilisasi Rupiah sangat penting untuk menghindarkan Indonesia dari krisis akibat gejolak global, yaitu agar tidak berdampak pada kenaikan harga-harga impor (*imported inflation*) sehingga mendukung upaya pengendalian inflasi, dan agar stabilitas moneter, sistem keuangan, dan stabilitas makroekonomi terjaga. Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) mencapai tertinggi 114,11 pada tanggal 27 September 2022 dan tercatat 103,49 pada akhir Desember 2022 atau mengalami penguatan sebesar 8,18% selama tahun 2022. Sementara itu, nilai tukar Rupiah sampai dengan akhir Desember 2022 terdepresiasi 8,45% dibandingkan dengan level akhir 2021, relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Filipina 8,50% dan India 10,15% (Grafik 2.3). Ke depan,

Grafik 2.2. Risk Adjusted Return (RAR)



Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada semester I 2022 tercatat meningkat pada semua kelompok yaitu inti, inflasi kelompok pangan bergejolak (*volatile food*, VF), dan inflasi kelompok harga yang diatur Pemerintah (*administered prices*, AP). Inflasi IHK pada Juni 2022 tercatat sebesar 4,35% (yoy), lebih tinggi dari 1,33% pada Juni 2021. Kenaikan inflasi IHK tersebut terjadi di seluruh wilayah dengan disparitas yang juga terpantau melebar. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih adanya permasalahan struktural dalam pengendalian inflasi VF khususnya terkait pola produksi dan kelancaran distribusi di daerah. Secara spasial, inflasi IHK tertinggi tercatat di provinsi Jambi, yaitu sebesar 7,01% (yoy), sementara inflasi IHK terendah dicatat di provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 2,20% (yoy).

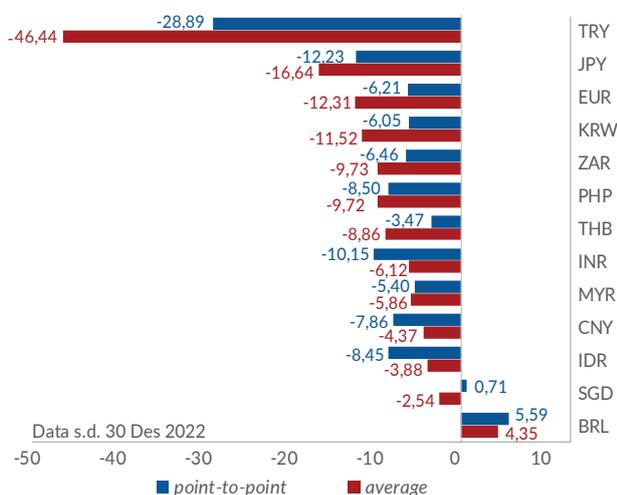
Inflasi inti meningkat namun tetap dalam level yang rendah, sejalan dengan permintaan domestik yang membaik secara gradual pascakebijakan pelonggaran mobilitas serta berlanjutnya transmisi inflasi komoditas global dan depresiasi nilai tukar. Inflasi inti pada Juni 2022 tercatat sebesar 2,63% (yoy), meningkat dibandingkan 1,49% pada tahun sebelumnya didorong oleh kenaikan pada semua disagregasinya. Inflasi inti *food* 3,73% (yoy) pada Juni 2022, meningkat dibanding 3,69% (yoy) pada Juni 2021, disumbang oleh peningkatan kelompok *food non-traded*. Namun demikian, kelompok *food traded* mengalami penurunan. Sementara itu, inflasi

inti *non-food* tercatat sebesar 2,31% (yoy) pada Juni 2022, meningkat dari 1,28% (yoy) pada Juni 2021. Berdasarkan komoditasnya, peningkatan inflasi inti terutama disumbang oleh kenaikan harga sewa rumah, komoditas sabun detergen bubuk/cair, mobil, dan nasi dengan lauk terutama didorong oleh pemberlakuan kegiatan *work from office* dan sekolah tatap muka, masih tingginya harga *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai bahan baku sabun, berakhirnya diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan kenaikan harga bahan pangan.

Inflasi VF meningkat signifikan pada semester I 2022 terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas hortikultura. Inflasi VF pada Juni 2022 tercatat sebesar 10,07% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 1,60% (yoy) pada bulan Juni tahun sebelumnya. Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh kondisi curah hujan tinggi yang mengakibatkan kendala produksi komoditas hortikultura terutama aneka cabai dan bawang merah. Selain itu, harga minyak goreng turut mengalami peningkatan pada semester I 2022 seiring dengan keterbatasan pasokan minyak goreng domestik karena peningkatan permintaan dan peningkatan harga CPO global. Lebih lanjut, peningkatan inflasi pada periode yang sama juga dialami oleh komoditas telur antara lain akibat kenaikan harga input produksi khususnya harga pakan dan bibit ayam.

Inflasi AP pada tengah tahun 2022 meningkat seiring kenaikan mobilitas. Pada Juni 2022, inflasi AP tercatat sebesar 5,33% (yoy), lebih tinggi dari 0,49% (yoy) pada tahun sebelumnya terutama disumbang oleh tarif angkutan udara (AU) dan bensin. Kenaikan tarif AU dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan setelah pemberlakuan kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat dan HBKN Idulfitri, terbatasnya armada maskapai, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket, serta pengenaan *fuel surcharge* oleh maskapai seiring kenaikan harga avtur. Sementara itu, kenaikan inflasi komoditas bensin didorong oleh kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina pada 1 April 2022. Peningkatan inflasi AP pada semester I 2022 juga bersumber dari kenaikan harga bahan bakar rumah tangga, yaitu LPG nonsubsidi dan subsidi di tingkat pengecer, serta dari komoditas aneka rokok seiring berlanjutnya transmisi kenaikan cukai tembakau oleh produsen.

Grafik 2.3. Pergerakan Rupiah vs Negara Lain



Inflasi IHK meningkat sangat tinggi pada triwulan III 2022. Inflasi IHK pada akhir triwulan III 2022 tercatat sebesar 5,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,35% (yoy). Peningkatan inflasi IHK terutama dipengaruhi oleh kenaikan inflasi AP yang mencapai 13,28% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2022 sebesar 5,33% (yoy), seiring dampak langsung (*first round*) penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022. Selain itu, kenaikan inflasi IHK juga bersumber dari inflasi VF sejalan dengan masih tingginya harga pangan global serta gangguan pasokan akibat cuaca. Kenaikan BBM bersubsidi juga telah meningkatkan ekspektasi inflasi yang mencapai 6,5% (yoy) yang berpotensi memberikan tekanan tambahan pada inflasi inti yang mulai meningkat. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga kebijakan BI7DRR secara *front loaded*, *pre-emptive*, dan *forward looking* untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)² untuk mengendalikan inflasi pangan termasuk dari dampak rambatan (*second round*) kenaikan BBM bersubsidi.

Inflasi pada akhir 2022 lebih rendah dari prakiraan awal, meskipun berada di atas sasaran 3,0±1%. Inflasi IHK pada akhir 2022 tercatat 5,51% (yoy), jauh lebih rendah dari prakiraan sesuai *consensus forecast* sebesar 6,5% (yoy) pascapenyesuaian harga BBM bersubsidi pada September 2022. Perkembangan tersebut didorong oleh dampak rambatan penyesuaian harga BBM yang lebih rendah terhadap kenaikan inflasi kelompok pangan bergejolak (*volatile food*, VF) dan inflasi kelompok harga diatur Pemerintah (*administered prices*, AP). Penurunan inflasi VF dari level tertinggi 11,47% pada Juli 2022 menjadi sebesar 5,61% (yoy) pada Desember 2022 tidak terlepas dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis lainnya melalui TPIP-TPID serta GNPIP dalam menurunkan laju inflasi pangan dengan mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga,

² Penjelasan lebih rinci mengenai GNPIP dapat dilihat pada Boks 2 Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)

Inflasi pascakenaikan harga BBM bersubsidi kembali terkendali tecermin pada ekspektasi inflasi dan tekanan inflasi yang terus menurun dan lebih rendah dari prakiraan awal

dan komunikasi efektif, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Selain itu, penurunan inflasi VF juga didorong oleh berlangsungnya musim panen komoditas hortikultura di daerah sentra produksi. Kenaikan inflasi AP yang tercatat sebesar 13,34% (yoy) juga tidak setinggi yang diprakirakan sebelumnya sejalan dengan penyesuaian harga BBM dan tarif angkutan yang lebih rendah termasuk penurunan tarif angkutan udara yang didukung penerapan kebijakan relaksasi pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) di bandara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan subsidi transportasi antara lain dengan menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah. Sementara itu, inflasi inti tetap terjaga pada level 3,36% (yoy), tetap berada dalam kisaran 3,0±1%, sejalan dengan lebih rendahnya dampak rambatan dari penyesuaian harga BBM, belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan, terkendalnya ekspektasi inflasi seiring respons kebijakan moneter Bank Indonesia, dan tetap terkelolanya inflasi harga impor (*imported inflation*) yang didukung kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Secara spasial, provinsi yang mengalami inflasi tertinggi pada Desember 2022 adalah Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Selatan, yaitu masing-masing sebesar 7,42% (yoy), 7,39% (yoy), dan 6,99% (yoy). Sementara itu, provinsi yang mengalami inflasi terendah adalah Maluku Utara, Papua Barat, dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yaitu masing-masing sebesar 3,37% (yoy), 3,87% (yoy), dan 4,22% (yoy).

Kondisi likuiditas di perbankan dan perekonomian tetap longgar sehingga mendukung penyaluran kredit dan pembiayaan APBN. Kondisi likuiditas longgar didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi

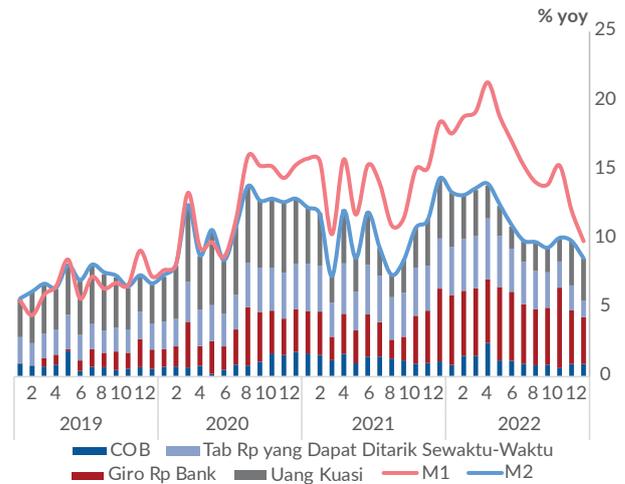
nasional dari pandemi Covid-19. Selama 2020 dan 2021, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas (*quantitative easing*) dalam jumlah besar ke perbankan, antara lain, melalui pembelian SBN untuk pendanaan APBN di pasar perdana dan *private placement* sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Hingga akhir 2021, kebijakan *quantitative easing* telah mencapai Rp874,4 triliun atau sekitar 5,3% dari PDB, salah satu injeksi likuiditas terbesar di negara berkembang. Untuk menjaga stabilitas sekaligus untuk memitigasi dampak rentetan global dari normalisasi kebijakan di negara maju, pada 2022 Bank Indonesia melakukan normalisasi kebijakan moneter dengan menyerap kelebihan likuiditas secara bertahap. Normalisasi likuiditas, antara lain, dilakukan melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dengan tetap mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit dan pembelian SBN di pasar primer untuk pembiayaan APBN. Dengan kebijakan kenaikan GWM tersebut, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) perbankan menurun dari 35,1% pada akhir 2021 menjadi 31,2% pada Desember 2022 (Grafik 2.4). Rasio ini masih lebih tinggi dari rerata rasio AL/DPK sebelum pandemi Covid-19 yang tercatat sekitar 20,7%. Kondisi likuiditas perbankan yang masih longgar tersebut mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit dan pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Likuiditas perekonomian juga tetap longgar, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 9,5% (yoy) dan 8,3% (yoy) pada Desember 2022 (Grafik 2.5). Berdasarkan komponennya, pertumbuhan uang beredar

Grafik 2.4. Perkembangan Rasio AL/DPK Perbankan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.5. Pertumbuhan M1, M2, dan Komponennya



Sumber: Bank Indonesia

didorong oleh kenaikan tabungan dan uang kuasi di masyarakat. Dari sisi faktornya, pertumbuhan uang beredar tersebut terutama didukung oleh kredit perbankan yang semakin meningkat seiring pemulihan ekonomi nasional.

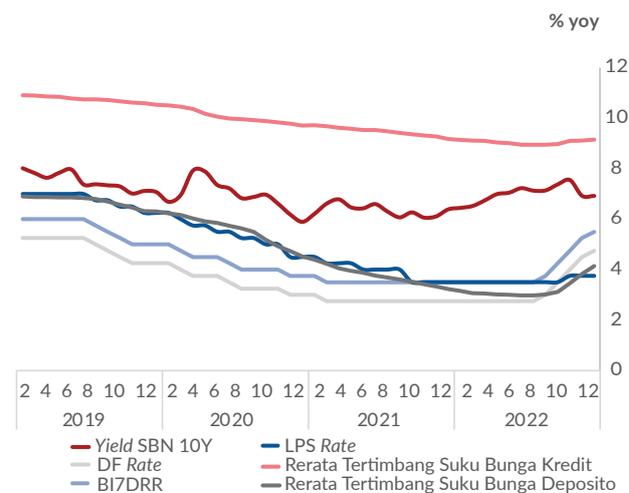
Dengan kondisi likuiditas perbankan yang masih longgar, dampak kenaikan suku bunga kebijakan terhadap kenaikan suku bunga kredit relatif terbatas. Selama bulan Agustus-Desember 2022 Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan moneter sebesar 200 bps menjadi 5,50%. Kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah *front loaded*, *pre-emptive*, dan *forward looking* untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ lebih awal yaitu ke paruh pertama 2023. Kebijakan kenaikan suku bunga tersebut juga dilakukan untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat semakin kuatnya mata uang dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat. Sejalan dengan kenaikan BI7DRR dan penguatan strategi operasi moneter Bank Indonesia, suku bunga IndONIA pada akhir Desember 2022 naik 223 bps dibandingkan dengan akhir Juli 2022 menjadi sebesar 5,02%.

Kenaikan suku bunga kebijakan tertransmisikan pada imbal hasil SBN tenor jangka pendek, sedangkan imbal hasil SBN tenor jangka panjang relatif terjaga. Yield SBN tenor 2 tahun naik sebesar 65 bps menjadi 5,89% dan yield SBN tenor 10

tahun turun sebesar 22 bps menjadi 6,92% pada akhir Desember 2022 dibandingkan akhir Juli 2022 sesuai mekanisme pasar seiring dengan kenaikan *yield* US Treasury (Grafik 2.6). Kenaikan tersebut dipengaruhi pula oleh mekanisme pasar seiring dengan perubahan *yield* US Treasury dan mulai masuknya *inflow* nonresiden pada SBN sejak akhir November 2022. Selain itu, kebijakan Bank Indonesia melakukan penjualan SBN tenor jangka pendek dan pembelian SBN tenor jangka panjang di pasar sekunder (*twist operation*) sebagai bagian untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah turut menjaga agar dampak kenaikan *yield* US Treasury tidak berlebihan. Sementara itu, suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan naik terbatas masing-masing sebesar 115 bps dan 21 bps pada Desember 2022 dibandingkan Juli 2022, menjadi 4,14% dan 9,15% (Grafik 2.7). Kenaikan suku bunga perbankan yang lebih terbatas ini seiring dengan likuiditas yang masih longgar yang memperpanjang efek tunda (*lag effect*) transmisi suku bunga kebijakan pada suku bunga dana dan kredit.

Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha terus menunjukkan peningkatan dan mendukung pemulihan ekonomi. Pertumbuhan kredit pada Desember 2022 tercatat sebesar 11,35% (yoy), ditopang oleh peningkatan pada seluruh jenis kredit dan seluruh sektor ekonomi (Grafik 2.8). Kredit modal kerja tumbuh tinggi sebesar 12,17% (yoy), sementara kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing tumbuh 12,00% (yoy) dan 9,42% (yoy). Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah, dengan pertumbuhan

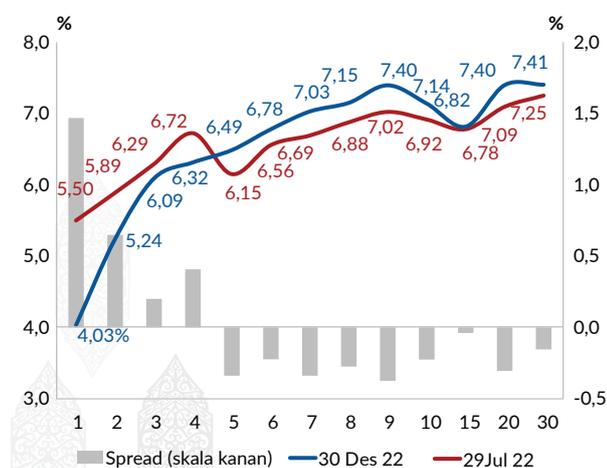
Grafik 2.7. Suku Bunga Perbankan



Sumber: Bank Indonesia

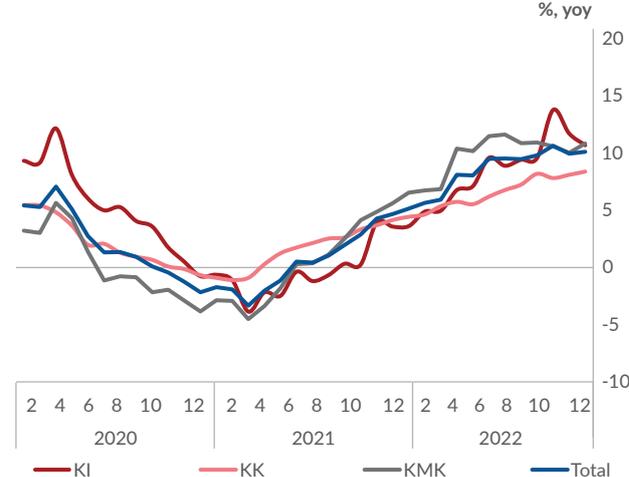
pembiayaan sebesar 20,15% (yoy) pada Desember 2022 (Grafik 2.9). Dari sisi penawaran, berlanjutnya perbaikan intermediasi perbankan didukung oleh standar penyaluran kredit yang tetap longgar (Grafik 2.10), seiring dengan membaiknya *appetite* perbankan dalam penyaluran kredit terutama di sektor Perdagangan, Industri, Pertanian, Konstruksi, dan Pertambangan. Dari sisi permintaan, peningkatan intermediasi ditopang oleh pemulihan kinerja korporasi dan rumah tangga yang terus berlanjut. Kinerja korporasi tecermin dari perbaikan kemampuan membayar, tingkat penjualan, dan belanja modal, terutama di sektor Perdagangan dan Pertambangan. Kinerja rumah tangga tecermin dari konsumsi dan investasi rumah tangga yang membaik sejalan dengan optimisme konsumen. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit UMKM

Grafik 2.6. Struktur Yield SBN per Tenor



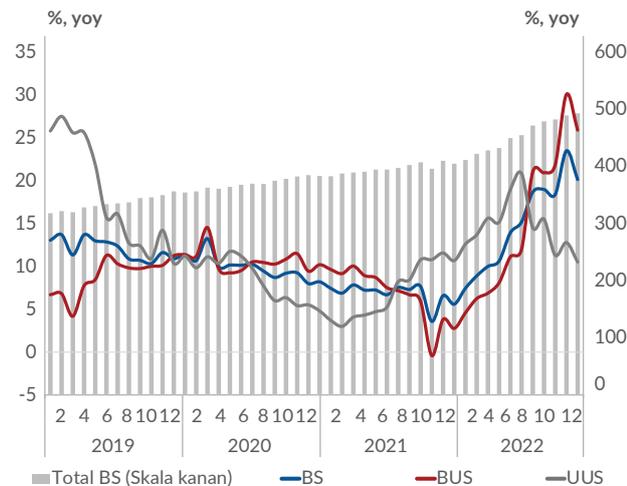
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.8. Perkembangan Kredit Perbankan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.9. Perkembangan Pembiayaan Syariah

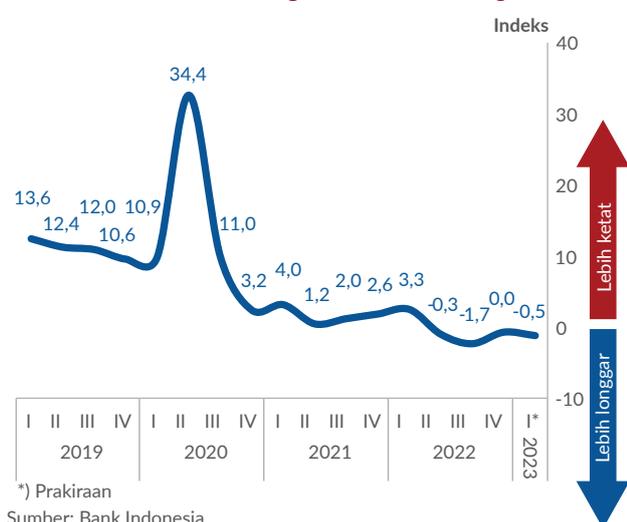


Sumber: Bank Indonesia

tercatat sebesar 10,47% (yoy) pada Desember 2022, terutama didukung oleh segmen mikro (Grafik 2.11). Pertumbuhan kredit diperkirakan akan terus tumbuh tinggi pada kisaran 10-12% (yoy) pada 2023.

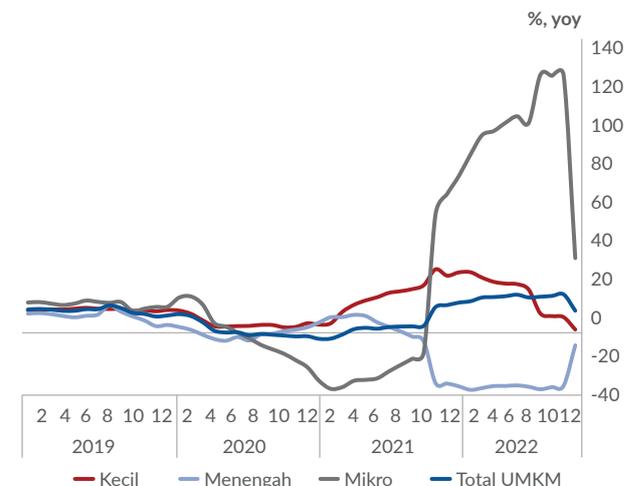
Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit, maupun likuiditas. Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*, CAR) pada November 2022 tetap tinggi sebesar 25,45% sejalan dengan semakin naiknya komponen modal dari akumulasi keuntungan maupun aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Seiring dengan kuatnya permodalan, risiko kredit tetap terkendali yang tecermin dari rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*, NPL) pada November 2022 yang tercatat 2,65% (bruto) dan 0,75% (neto)-(Grafik 2.12). Hal ini menunjukkan

Grafik 2.10. Perkembangan Indeks Lending Standard



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.11. Perkembangan Kredit UMKM

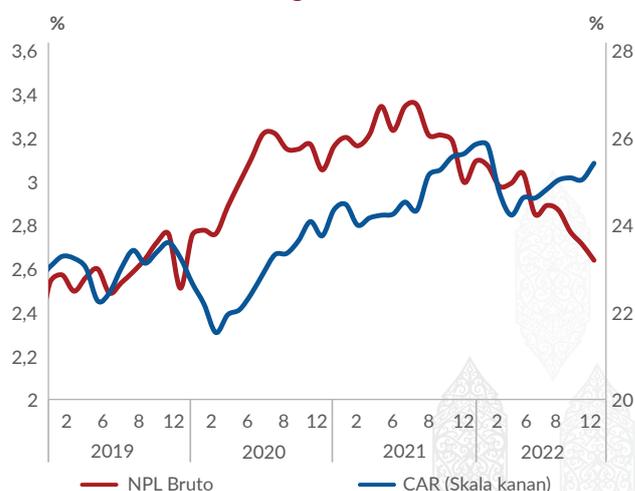


Sumber: Bank Indonesia

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang telah dibentuk perbankan mencukupi dalam memitigasi risiko kredit. Risiko likuiditas perbankan terjaga dengan tingginya kecukupan likuiditas. Rasio AL/DPK pada Desember 2022 yang sebesar 31,2% dan lebih tinggi dari rerata AL/DPK sebelum pandemi Covid-19 yang sebesar 20,7%.

Ke depan, upaya memperkuat ketahanan sistem perbankan perlu terus dilakukan guna memitigasi berbagai risiko, baik dari sisi kondisi makroekonomi domestik maupun gejolak eksternal. Sejumlah risiko dimaksud termasuk risiko kredit dengan masih berlanjutnya *Loan at Risk* (LaR) di sejumlah sektor ekonomi seperti konstruksi dan perhotelan karena dampak luka memar (*scarring effect*) pandemi Covid-19, risiko likuiditas karena lebih tingginya pertumbuhan kredit dibandingkan dengan DPK,

Grafik 2.12. Perkembangan CAR dan NPL Perbankan



Sumber: OJK, Bank Indonesia

maupun risiko pasar karena depresiasi nilai tukar Rupiah dan kenaikan *yield* SBN. Secara keseluruhan, hasil simulasi Bank Indonesia terhadap berbagai risiko tersebut menunjukkan bahwa ketahanan perbankan diperkirakan tetap terjaga. Hal ini sejalan pula dengan hasil Survei Risiko Sistemik yang dilakukan BI terhadap 120 responden dari lembaga keuangan, korporasi, pengamat ekonomi, dan akademisi pada Oktober 2022 yang menunjukkan sebagian besar percaya dan sangat percaya stabilitas sistem keuangan akan tetap terjaga baik sampai dengan maupun lebih dari 6 (enam) bulan ke depan (Grafik 2.13).

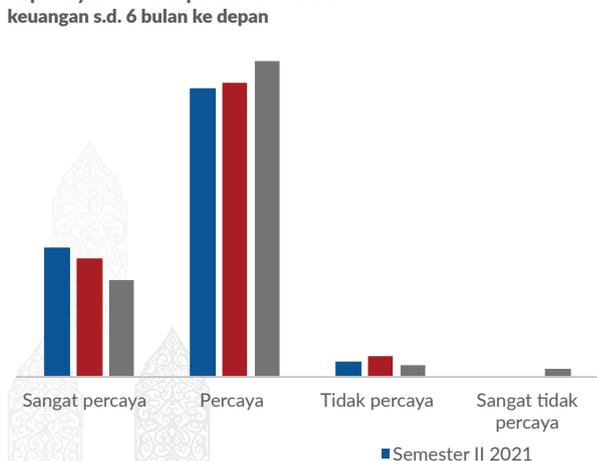
Nilai transaksi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia terus tumbuh meningkat di tengah kembalinya pola berbelanja *offline*. Transaksi *e-commerce*, transaksi uang elektronik (UE) dan transaksi *digital banking* tumbuh pesat dengan nilai *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) tahun 2018-2022 mencapai dua digit (Tabel 2.3). Pertumbuhan yang persisten ini akan terus berlanjut, khususnya di area *e-commerce* yang diprediksi tetap tumbuh positif di tengah peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan makin longgarnya kebijakan pembatasan mobilitas. Pertumbuhan *Gross Merchandising Value* (GMV) ekonomi digital Indonesia pada 2022 mencapai 22% utamanya didominasi oleh *e-commerce*, transportasi dan makanan, *travel online*, dan media digital (Google, Temasek, dan Bain, 2022). Ke depan, pembayaran digital diprediksi akan mempertahankan momentum peningkatan ini utamanya terjadi pada kaum milenial.

Bank Indonesia terus melanjutkan percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung akselerasi ekonomi keuangan digital dan pemulihan ekonomi nasional. *Outcome* berbagai program digitalisasi sesuai BSPI 2025, seperti reformasi regulasi, QRIS, BI-FAST, SNAP mulai menunjukkan hasil. Sejalan dengan hal tersebut, transaksi ekonomi dan keuangan digital tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya akseptasi masyarakat dan preferensi masyarakat berbelanja *online* serta akselerasi *digital banking*.

Kehadiran QRIS sebagai standar QR Pembayaran Nasional terbukti mempercepat perluasan ekosistem *merchant* digital, pengguna, serta interoperabilitas pembayaran digital. Jumlah *merchant* QRIS kini mencapai 24 juta tersebar di seluruh provinsi, dengan jumlah pengguna lebih dari 28 juta yang menggunakan baik dengan sumber dana uang elektronik, rekening tabungan, maupun kartu kredit yang diselenggarakan bank dan *fintech*. Transaksi QRIS tumbuh akseleratif mencapai 260,5% (yoy) dengan pangsa transaksi *off us* yang terus meningkat yang menunjukkan makin terciptanya interoperabilitas di dalam industri. Jumlah *merchant* UMKM mendominasi yang mengindikasikan QRIS sebagai jalan pembuka inklusi keuangan bagi UMKM. QRIS juga mendorong penyelenggara jasa pembayaran khususnya bank melakukan adopsi *mobile apps* untuk dapat bergabung pada ekosistem QRIS yang terus meluas.

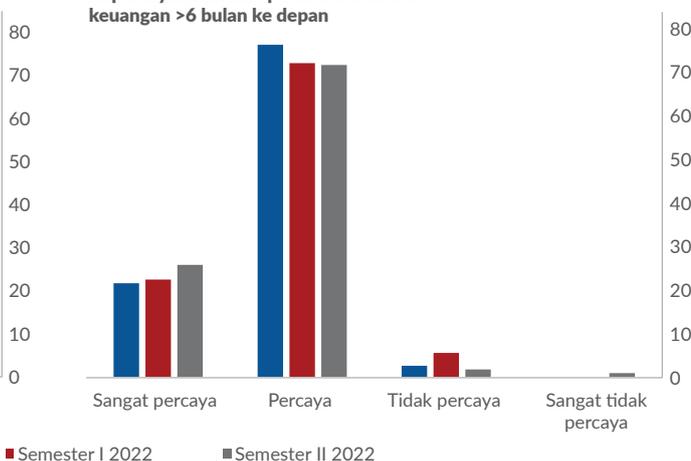
Grafik 2.13. Persepsi Stabilitas Sistem Keuangan

Kepercayaan terhadap stabilitas sistem keuangan s.d. 6 bulan ke depan



Sumber: Bank Indonesia

Kepercayaan terhadap stabilitas sistem keuangan >6 bulan ke depan



Tabel 2.3. *Compound Annual Growth Rate (CAGR) Transaksi Ekonomi Keuangan Digital Tahun 2018-2022*

Transaksi	CAGR		Transaksi	CAGR	
	Nilai	Volume		Nilai	Volume
E-commerce	35,1%	47,7%	ATM/D	4,7%	2,6%
Digital Banking	19,2%	18,2%	KK	0,5%	0,1%
Uang Elektronik	53,3%	18,65%	UYD	6,5%	

Sumber: Bank Indonesia

Percepatan transformasi digital perbankan mendorong kolaborasi dan kompetisi yang sehat antara uang elektronik dan layanan *digital banking*.

Instrumen pembayaran uang elektronik tetap tumbuh di atas 30% seiring dengan makin luasnya ekosistem yang terhubung baik *e-commerce*, *ride-hailing*, dan *food delivery*, serta peningkatan mobilitas untuk *usecase* jalan tol dan parkir. Pada 2022, nilai transaksi UE tumbuh sebesar 36,0% (yoy) mencapai Rp399,6 triliun. Di sisi lain, nilai transaksi *digital banking* terus meningkat akseleratif 28,7% menjadi Rp52.545,8 triliun. Beberapa pelaku industri memposisikan uang elektronik sebagai akses masuk konsumen ke layanan jasa keuangan sehingga mendorong dibukanya akuisisi nasabah bank melalui kanal uang elektronik serta mempermudah *top-up* dari *mobile apps* yang dimiliki dengan dukungan teknologi API.

Normalisasi mobilitas turut mendorong kembalinya masyarakat menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu seperti ATM/D dan Kartu Kredit, serta uang kartal yang diedarkan.

Transaksi ATM/D secara nilai meningkat sebesar 20,8% (yoy) yang didominasi transaksi belanja dan tarik tunai. Demikian halnya juga dengan transaksi kartu kredit yang tercatat meningkat sebesar 31,7% (yoy) yang menandakan aktivitas *travelling* dan *leisure* mulai pulih. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan normalisasi mobilitas, dari sisi tunai, uang kartal yang diedarkan pada 2022 meningkat 6,9% (yoy) mencapai Rp1.026,5 triliun. Bank Indonesia memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI melalui penguatan strategi digitalisasi dan perluasan distribusi uang, termasuk Program Ekspedisi Rupiah

Berdaulat ke wilayah 3T (Terluar, Terdepan, dan Terpencil), serta perluasan gerakan Cinta Bangsa dan Paham (CBP) Rupiah.

Dalam arah kebijakan pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang mencukupi untuk memenuhi meningkatnya permintaan uang kartal seiring dengan meningkatnya transaksi ekonomi secara nasional.

Bank Indonesia juga senantiasa memastikan terjaganya kualitas uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI melalui kegiatan distribusi uang Rupiah ke seluruh kantor Bank Indonesia serta layanan kas kepada masyarakat dan perbankan. Dalam rangka tugas tersebut, Bank Indonesia melakukan kegiatan kas keliling ke 81 (delapan puluh satu) pulau di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, dan Terpencil) bekerja sama dengan TNI AL melalui kegiatan "Ekspedisi Rupiah Berdaulat". Bank Indonesia juga meneruskan kerja sama dengan bank umum dalam lingkup kegiatan kas titipan di 87 Kabupaten/Kota yang relatif jauh dari lokasi kantor Bank Indonesia. Sebagai bentuk sinergi bersama *stakeholders*, pada 2022, Bank Indonesia juga telah membentuk Forum Industri Pengelolaan Uang Rupiah (FORIN PUR) bersama Perbankan dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) sebagai sarana penguatan komunikasi kebijakan PUR oleh Bank Indonesia kepada industri PUR. Upaya peningkatan kualitas uang Rupiah juga dilakukan melalui peluncuran 7 (tujuh) pecahan uang kertas Tahun Emisi (TE) 2022 yang memiliki spesifikasi bahan dan cetak lebih baik dari emisi sebelumnya, kegiatan pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar dan pengedaran uang Rupiah hasil cetak sempurna (HCS), serta uang layak edar.

2.2

Prospek Tetap Kuat pada 2023 Meskipun Sedikit Melambat

Perbaikan ekonomi domestik diperkirakan terus berlanjut ditopang oleh permintaan domestik yang berdaya tahan dan kinerja ekspor yang tetap kuat. Perekonomian nasional diperkirakan terus membaik ditopang oleh peningkatan konsumsi swasta dan investasi, tetap kuatnya ekspor, serta daya beli masyarakat yang masih terjaga di tengah kenaikan inflasi. Berbagai indikator dan hasil survei Bank Indonesia terakhir, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur mengindikasikan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diperkirakan tetap kuat, khususnya batu bara, CPO, serta besi dan baja seiring dengan permintaan beberapa mitra dagang utama yang masih kuat dan kebijakan Pemerintah untuk mendorong ekspor CPO dan turunannya. Secara spasial, kinerja positif ekspor ditopang oleh seluruh wilayah, terutama Kalimantan dan Sumatera, yang tetap tumbuh kuat. Perbaikan ekonomi nasional juga tecermin pada kinerja lapangan usaha utama, seperti Perdagangan, Pertambangan, dan Pertanian.

Pertumbuhan ekonomi pada 2023 diperkirakan tetap kuat meskipun sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5-5,3% sebelum meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024 (Tabel 2.4). Berlanjutnya proses pemulihan ekonomi Indonesia

didorong oleh solidnya permintaan domestik, baik konsumsi swasta maupun investasi, sejalan dengan terus meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi-keuangan, tetap positifnya kinerja ekspor didukung oleh kenaikan nilai tambah dari hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, serta berlanjutnya penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN).

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), prospek kinerja LU diperkirakan terus membaik sejalan dengan permintaan domestik dan kinerja ekspor yang tetap kuat. LU terkait permintaan domestik dan mobilitas diperkirakan akan tumbuh kuat pada 2022 (Tabel 2.5). Perbaikan terjadi terutama pada sektor yang terkait ekspor seperti Industri Pengolahan, sedangkan sektor terkait dengan permintaan domestik seperti Konstruksi, Perdagangan, dan Infokom diperkirakan bias bawah dari prakiraan sebelumnya dampak dari kenaikan harga BBM dan suku bunga. Prospek sektor Pertanian 2022 lebih rendah dari prakiraan semula dipengaruhi oleh produksi padi yang melambat karena curah hujan yang tinggi dan gangguan hama. Kinerja industri manufaktur diperkirakan lebih baik pada triwulan IV 2022, didukung oleh kinerja industri berorientasi ekspor seperti logam dasar yang diperkirakan meningkat. Kinerja sektor Pertambangan pada triwulan III dan IV 2022 lebih rendah dari prakiraan sebelumnya dipengaruhi Pertambangan logam lebih

Tabel 2.4. Proyeksi Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran

dalam persen

Komponen	2022	2023
Produk Domestik Bruto	4,5 - 5,3	4,5 - 5,3
Konsumsi Swasta	4,4 - 5,2	4,6 - 5,4
Konsumsi Pemerintah	-5,1 - -4,3	3,2 - 4,0
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,8 - 4,6	6,8 - 7,6
Ekspor Barang dan Jasa	14,9 - 15,7	6,0 - 6,8
Impor Barang dan Jasa	12,3 - 13,1	6,6 - 7,4

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 2.5. Proyeksi Pertumbuhan PDB Sisi Sektoral

dalam persen

Komponen	2022	2023
Produk Domestik Bruto	4,5 - 5,3	4,5 - 5,3
Pertanian	1,6 - 2,4	3,7 - 4,5
Pertambangan dan Penggalian	3,7 - 4,5	3,5 - 4,3
Industri Pengolahan	3,4 - 4,2	3,6 - 4,4
Listrik dan Gas	5,5 - 6,3	3,3 - 4,1
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	3,2 - 4,0	4,1 - 4,9
Konstruksi	1,9 - 2,7	5,4 - 6,2
Perdagangan Besar dan Eceran	3,7 - 4,5	4,0 - 4,8
Transportasi dan Pergudangan	13,0 - 13,8	8,0 - 8,8
Akomodasi dan Makan Minum	10,1 - 10,9	5,6 - 6,4
Informasi dan Komunikasi	7,4 - 8,2	9,0 - 9,8
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,9 - 3,7	5,7 - 6,5
Real Estat	1,8 - 2,6	2,3 - 3,1
Jasa Perusahaan	6,2 - 7,0	7,5 - 8,3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-2,2 - -1,4	0,3 - 1,1
Jasa Pendidikan	3,4 - 4,2	4,2 - 5,0
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,5 - 6,3	5,9 - 6,7
Jasa Lainnya	5,8 - 6,6	2,9 - 3,7

Sumber: Bank Indonesia

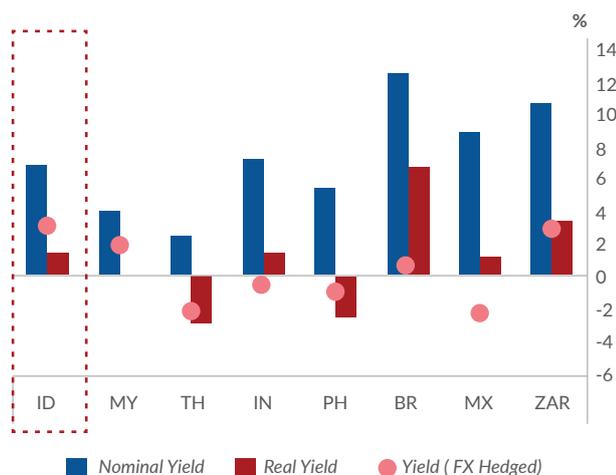
rendah, migas kontraksi lebih dalam, serta kendala cuaca yang memengaruhi produksi batu bara. Prospek LU utama pada 2023 diperkirakan melambat seiring tertahannya kinerja eksternal serta harga komoditas SDA yang tidak sekuat 2022.

Ketahanan eksternal perekonomian Indonesia ke depan diperkirakan tetap solid, ditopang oleh kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang tetap sehat sejalan dengan kinerja ekspor yang masih kuat. Neraca transaksi berjalan tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran surplus 0,4% - 1,2% dari PDB, ditopang oleh ekspor seiring harga komoditas global yang masih tinggi dan permintaan atas komoditas Indonesia yang tetap baik. Sementara itu, transaksi modal dan finansial lebih banyak didukung oleh investasi langsung sehingga kinerja NPI tahun 2022 terkendali dan diperkirakan tetap surplus. Kinerja NPI pada 2023 diperkirakan tetap sehat, ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial di tengah kinerja neraca transaksi berjalan yang terjaga. Perlambatan ekonomi global mendorong moderasi ekspor. Di sisi lain, impor meningkat sejalan dengan perbaikan permintaan domestik sehingga surplus transaksi berjalan tahun 2023 diperkirakan turun, berada dalam kisaran

surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB. Transaksi modal dan finansial diperkirakan membaik didukung oleh investasi langsung dan aliran investasi portofolio asing yang kembali masuk ke Indonesia. Sementara itu, posisi cadangan devisa, yang pada akhir Desember 2022 tercatat sebesar 137,2 miliar dolar AS, akan makin meningkat dan mampu menopang ketahanan eksternal Indonesia. Dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global, setidaknya setelah periode kenaikan FFR mulai mencapai puncaknya pada triwulan I 2023, nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak stabil dan cenderung menguat sesuai fundamentalnya. Hal ini sejalan dengan prakiraan kinerja NPI yang surplus, akan terkendalinya inflasi kembali ke sasaran $3,0\pm 1\%$, defisit fiskal di bawah 3% PDB, dan cukup baiknya pertumbuhan ekonomi, di samping tetap menariknya imbal hasil SBN Indonesia dibandingkan dengan perkembangan di negara berkembang lain (Grafik 2.14).

Inflasi pada 2023 diperkirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran $3,0\pm 1\%$. Inflasi inti diperkirakan akan lebih cepat kembali dalam sasaran didukung oleh tekanan inflasi harga impor (*imported inflation*) yang tetap terkendali, nilai tukar Rupiah yang relatif

Grafik 2.14. Imbal Hasil Obligasi Negara Berkembang



Sumber: Bloomberg

stabil, serta respons kebijakan moneter yang *front loaded*, *pre-emptive*, dan *forward looking* untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti ke depan kembali dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ lebih awal, yaitu ke paruh pertama 2023. Kenaikan inflasi VF diperkirakan masih akan terkendali seiring dengan penurunan harga komoditas global, prakiraan cuaca 2023 yang lebih kondusif, serta langkah pengendalian harga oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis lainnya melalui TPJP-TPID serta GNPIP yang makin erat. Inflasi AP juga

akan lebih rendah dengan potensi penyesuaian harga energi yang minimal akibat penurunan harga keekonomian BBM. Sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia akan terus diperkuat untuk memastikan inflasi agar segera kembali ke sasaran yang telah ditetapkan.

Transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) terus berkembang didorong kebijakan Bank Indonesia untuk mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Perkembangan terakhir menunjukkan perkembangan ekonomi dan keuangan digital (EKD) terus meningkat pesat ditopang oleh meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi *digital banking*. Nilai transaksi Uang Elektronik (UE) pada 2022 tumbuh 36,0% (yoy) hingga mencapai Rp400 triliun (Tabel 2.6). Nilai transaksi *digital banking* pada 2022 meningkat 28,7% (yoy) menjadi Rp52.546 triliun. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran tersebut mendorong transaksi *e-commerce* juga berkembang pesat, tumbuh 18,7% mencapai Rp476 triliun pada 2022. Untuk mendorong akselerasi dan inovasi sistem pembayaran, Bank Indonesia terus mempercepat implementasi *Blueprint* Sistem

Tabel 2.6. Kinerja dan Proyeksi Sistem Pembayaran Indonesia

Transaksi	Pertumbuhan (%)			Nilai (Triliun Rp)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Ekonomi Keuangan Digital						
E-Commerce	18,7	11,8	10,4	476	533	588
Digital Banking	28,7	22,1	23,7	52.546	64.175	79.355
Uang Elektronik	36,0	23,9	25,7	400	495	622
Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)						
Kartu ATM-D	20,8	2,1	2,6	7.922	8.089	8.303
Kartu Kredit	31,7	20,6	16,0	322	388	450
Sistem Pembayaran BI						
SKNBI	4,7	-2,4	-4,5	5.133	5.012	4.788
BI-FAST		180,0	86,0	1.986	5.757	10.688
BI-RTGS	15,3	5,7	7,7	98.247	103.816	111.845
Pengedaran Uang Rupiah						
UYD	6,9	7,6	7,8	1.026	1.104	1.190

Sumber: Bank Indonesia



Pembayaran (BSPI) 2025, baik perluasan akseptasi dan fitur-fitur layanan pembayaran QRIS dan BI-FAST, maupun penerapan SNAP dan konsolidasi industri sistem pembayaran Indonesia untuk membentuk *unicorn-unicorn* tangguh dan kompetitif dari Indonesia. Bank Indonesia juga akan memperluas kerja sama sistem pembayaran antarnegara, baik ASEAN maupun dengan mitra strategis negara lain.

Peningkatan transaksi EKD diperkirakan terus berlanjut pada 2023 didukung kebijakan Bank Indonesia untuk akselerasi dan penguatan integrasi ekosistem EKD. Adopsi penggunaan *e-commerce* diperkirakan akan makin luas dan meningkat hingga mencapai Rp533 triliun pada 2023 didukung, antara lain, oleh perluasan adopsi digital masyarakat, peningkatan *merchant*, dan perluasan infrastruktur sistem pembayaran digital, yang salah satunya terlihat dari peningkatan nilai transaksi BI-FAST yang diperkirakan tumbuh 180,0% mencapai Rp5.757 triliun. Nilai transaksi UE pada 2023 diperkirakan akan tumbuh 23,9% dengan nilai mencapai Rp495

triliun. Sementara itu, transaksi menggunakan kartu, baik debit maupun kredit, diperkirakan masih tumbuh positif seiring dengan perubahan preferensi masyarakat atas pembayaran digital dan kembalinya aktivitas belanja masyarakat di pusat perbelanjaan, sebesar masing-masing 2,1% dan 20,6% pada 2023. Dari sisi *digital banking*, strategi layanan *digital banking* akan terus berkembang. Bank konvensional mengembangkan *apps* untuk membangun ekosistem digital dengan pengintegrasian fitur *lifestyle* sementara bank digital mempertahankan fitur layanan keuangan yang sederhana, intuitif dan mudah, dengan memanfaatkan ekosistem digitalnya. Dengan perkembangan tersebut, nilai transaksi *digital banking* diperkirakan akan terus meningkat, tumbuh 22,1% mencapai Rp64.175 triliun pada 2023. Dari sisi pengedaran uang, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada 2023 diperkirakan naik 7,6% mencapai Rp1.104 triliun. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, termasuk peredaran Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022.

2.3

Prospek Jangka Menengah Menuju Indonesia Maju

Prospek perbaikan perekonomian nasional diprakirakan terus berlanjut dalam jangka menengah dengan struktur ekonomi yang berdaya tahan sehingga mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Maju. Prakiraan tersebut juga didorong oleh prospek ekonomi global yang membaik serta kenaikan investasi dan produktivitas dari implementasi kebijakan reformasi struktural baik di sektor riil maupun akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Peningkatan daya saing perekonomian serta kapasitas dan kapabilitas industri mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan lebih berdaya tahan dengan struktur perekonomian yang makin baik. Keberhasilan hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah ekspor sekaligus berdampak pada kenaikan investasi dan produktivitas. Selain itu, iklim bisnis dan investasi yang lebih baik, diantaranya melalui implementasi UU Cipta Kerja, akan mendorong penguatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat hingga berada pada kisaran 4,8-5,6% pada 2025, 4,9-5,7% pada 2026, dan 5,0-5,8% pada 2027. Inflasi diprakirakan tetap terjaga rendah pada kisaran 1,5-3,5%, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian. Defisit transaksi berjalan diprakirakan juga tetap terkendali pada tingkat yang rendah sehingga menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Secara keseluruhan, dengan lintasan prospek tersebut, Indonesia diprakirakan mampu menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2047.

Beberapa risiko baik jangka pendek maupun jangka menengah tetap perlu mendapat perhatian karena dapat mengganggu prospek perekonomian ke depan. Pada jangka pendek, gejolak global dapat memengaruhi perekonomian domestik melalui jalur perdagangan (*trade channel*) dan jalur keuangan (*financial channel*). Pada jalur perdagangan, dampak perlambatan ekonomi global dan bahkan resesi ekonomi di beberapa negara dapat menyebabkan risiko penurunan kontribusi ekspor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, harga energi dan pangan global yang tinggi akan berakibat pada masih kuatnya tekanan kenaikan inflasi di dalam negeri. Dari sisi jalur keuangan, nilai tukar dolar AS yang kuat, suku bunga kebijakan moneter dan *yield US Treasury* yang masih tinggi, serta premi risiko dan ketidakpastian pasar keuangan global berisiko menimbulkan pelarian investasi portofolio asing (*capital outflows*), meningkatnya *yield SBN*, dan tingginya tekanan pelemahan (depresiasi) nilai tukar Rupiah. Transmisi gejolak global tersebut akan mendorong kenaikan risiko stabilitas sistem keuangan, baik dari risiko pasar karena pelemahan nilai tukar dan kenaikan *yield SBN*, maupun risiko kredit karena penurunan kegiatan perekonomian domestik. Pada jangka menengah-panjang, terdapat risiko terjadinya multipolar pola perdagangan dunia dapat memengaruhi prospek kebangkitan ekonomi menuju Indonesia Maju. Risiko ini terjadi akibat adanya fragmentasi politik dan ekonomi yang mendorong penurunan dominasi AS dan Eropa dalam perdagangan dan perekonomian global, seiring meningkatnya peran Asia, terutama Tiongkok dan India. Selain itu, sejumlah negara di Afrika juga akan makin tumbuh dan menjadi tujuan perdagangan global.

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)

Kestabilan harga dan ketahanan pangan menjadi salah satu tantangan ekonomi dan keuangan Indonesia pada 2022. Harga pangan strategis khususnya hortikultura, yaitu cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah sempat meningkat signifikan pada pertengahan tahun akibat gangguan cuaca di sentra produksi. Selain itu, harga minyak goreng juga naik tajam pada awal tahun seiring dengan kenaikan harga CPO global akibat gangguan rantai pasokan global. Di tengah penurunan produksi domestik, berbagai kondisi tersebut pada gilirannya berisiko mengganggu ketahanan pangan nasional.

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) merupakan sarana melakukan sinergi dan inovasi untuk memperkuat program pengendalian inflasi dan membangun ketahanan pangan nasional. GNPIP ini menjadi bagian dari program Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPID - TPID) yang dilakukan secara sinergis antara Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta mitra strategis. Penguatan sinergi dan inovasi ini mendukung *extra effort* pengendalian inflasi pangan dan merupakan salah satu arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022. GNPIP bertujuan untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi pangan dari sisi suplai dan mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan, sehingga dapat mendukung daya beli dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan dalam upaya mendukung pengendalian inflasi pangan juga ditempuh sekaligus untuk mendorong peran UMKM.

GNPIP dilakukan secara terintegrasi, end-to-end, inovatif, dan berskala nasional dalam kerangka Kestabilan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K). Upaya GNPIP difokuskan pada tujuh (7) program unggulan yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia, yaitu (i) Optimalisasi anggaran K/L dan PEMDA untuk Operasi Pasar (OP) dan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), serta untuk menjaga daya

beli; (ii) Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD); (iii) Optimalisasi fasilitasi distribusi pangan strategis melalui subsidi ongkos angkut; (iv) Memperkuat ketahanan komoditas hortikultura dan pasokan pangan strategis lainnya, antara lain, dalam bentuk gerakan tanam cabai (Gertam Cabai) dan replikasi *best practice* model bisnis hulu hilir kluster cabai; (v) Peningkatan pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan) dan sarana produksi pertanian (saprotan) dalam rangka mendukung pengembangan kluster pangan secara *end-to-end*; (vi) Penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), digitalisasi, data dan informasi pangan; serta (vii) Penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi. Dalam pelaksanaannya, sebagian program-program ini ditempuh sekaligus untuk mendorong peran UMKM.

Pelaksanaan GNPIP pada 2022 dilakukan di seluruh 46 wilayah kerja KPwDN selama Juli hingga Desember 2022. Target yang akan dicapai pada 2022 mencakup (i) pelaksanaan OP sebanyak 254 titik di 38 KPwDN; (ii) perluasan 40 KAD di 31 KPwDN; (iii) pelaksanaan 34 program kebijakan subsidi ongkos angkut di 14 KPwDN; (iv) Gertam Cabai sebanyak 0,94 juta *polybag* oleh 46 KPwDN dan replikasi model bisnis sebanyak 33 program di 23 KPwDN; (v) penyaluran alsintan dan saprotan melalui sinergi dengan 29 Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) di 18 KPwDN; (vi) pelaksanaan digitalisasi sebanyak 46 program; (vii) penguatan koordinasi dan komunikasi melalui pelaksanaan 68 *High Level Meeting* (HLM) TPID di 33 KPwDN (Gambar 1).

Seluruh program GNPIP hingga akhir tahun berada di atas target, dengan capaian tertinggi oleh kegiatan Operasi Pasar. Realisasi OP hingga 30 Desember 2022 mencapai 1038,5% dengan pelaksanaan sebanyak 2638 titik di 46 KPwDN untuk komoditas aneka cabai, bawang merah, beras, minyak goreng, daging sapi, daging dan telur ayam ras, serta gula pasir. Komitmen TPID untuk menjaga stabilitas harga secara merata di daerah mendorong pelaksanaan OP yang lebih banyak dari prakiraan awal, termasuk yang telah disinergikan

Gambar 1. Target dan Realisasi Program GNPIP

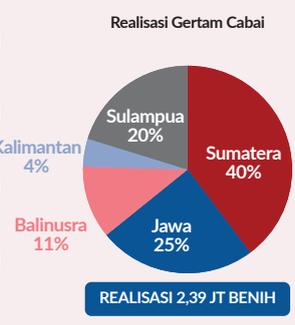
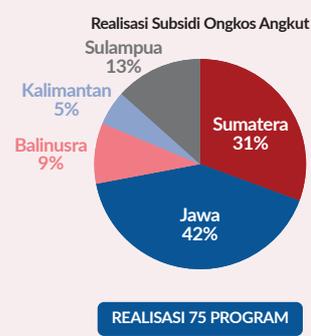
TARGET DAN REALISASI PROGRAM			
	Target (Juli - Des 2022)	Realisasi (Juli - 30 Des 2022)	
Pasar Murah	254 Titik di 38 KPwDN	2638 Titik di 46 KPwDN	1038,5%
Kerja Sama Antar Daerah (KAD)	40 KAD di 31 KPwDN	63 KAD di 25 KPwDN	157,5%
Subsidi Ongkos Angkut	34 Program di 14 KPwDN	75 Program di 32 KPwDN	220,6%
Gertam Cabai	0,94 Juta Polybag di 46 KPwDN	2,39 Juta Polybag di 46 KPwDN	254,2%
Replika Model Bisnis	33 Program di 23 KPwDN	86 Program di 34 KPwDN	260,6%
Alsintan dan Saprotan (PSBI)	18 KPwDN 29 PSBI*	45 KPwDN Rp 32,21 miliar	250,0%
Digitalisasi (Data dan Informasi)	46 Program	48 Program di 40 KPwDN	104,3%
Koordinasi dan Komunikasi	68 HLM di 33 KPwDN	152 HLM di 33 KPwDN	223,5%

*(nominal sesuai kebutuhan Pengembangan kluster pangan)

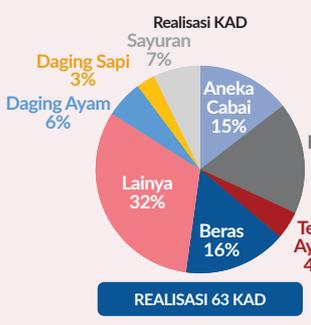
REALISASI PROGRAM BERDASARKAN WILAYAH & KOMODITAS



Sumber: Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia



dengan pelaksanaan OP oleh Kementerian/ Lembaga. Program OP ini dinilai cukup efektif dalam menurunkan harga mayoritas komoditas dalam OP. Namun, khusus beras dan daging sapi masih belum sepenuhnya optimal mengingat harga beras yang tinggi juga disebabkan oleh pola musimannya serta aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Badan Pangan Nasional. Sementara itu, untuk daging sapi dinilai memerlukan perluasan titik dan volume OP untuk mengimbangi lonjakan permintaan, di tengah penurunan stok akibat penyakit mulut dan kuku (PMK).

Pelaksanaan program Gertam Cabai dan replikasi model bisnis hulu hilir kluster cabai juga melebihi target. Hingga 30 Desember 2022, kedua program tersebut masing-masing mencapai 254,2% dan 260,6% dari target awal. Sebanyak 2,39 juta polybag bibit telah dibagikan di 46 KPwDN dengan penerima, antara lain, kelompok wanita tani dan masyarakat desa binaan. Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya pendampingan dan edukasi terkait ketahanan pangan kepada masyarakat. Hingga Desember 2022, hasil panen Gertam Cabai diperkirakan dapat memenuhi

konsumsi rumah tangga penerima bibit sehingga harga aneka cabai di akhir tahun terkendali. Replikasi model bisnis mencapai 260,6% dari target dengan pelaksanaan 86 program di 34 KPwDN. Dalam program ini, telah dipetakan *offtaker* potensial yang dapat menyerap kelebihan hasil produksi, termasuk melalui Gertam Cabai. *Offtaker* yang memiliki potensi tersebut terdiri dari agregator, industri, dan *market place*. Meskipun demikian, kerja sama dengan *offtaker* perlu terus diperkuat terutama untuk penyerapan hasil panen dan stabilisasi harga.

Realisasi program subsidi ongkos angkut dan KAD juga lebih tinggi dari target awal. Sampai dengan 30 Desember 2022, kedua program tersebut telah mencapai masing-masing sebesar 220,6% dan 157,5% dari targetnya. Sebanyak 75 program subsidi ongkos angkut telah dilakukan di 32 KPwDN untuk komoditas aneka cabai, bawang merah, minyak goreng, dan telur ayam ras. Pelaksanaan subsidi ongkos angkut juga dilakukan untuk mendukung kegiatan OP, dengan sumber pendanaan, antara lain, melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

serta 2% Dana Transfer Umum (DTU). Namun, penggunaan anggaran subsidi ongkos angkut dinilai belum sepenuhnya optimal terutama disebabkan oleh minimnya pemahaman daerah mengenai ketentuan dan pelaksanaan terkait BTT dan DTU. Program KAD mencapai 157,5% dari target awal, yaitu sebanyak 63 KAD di 25 KPwDN, dengan mitra dagang KAD mencakup intra dan antarprovinsi. Beberapa komoditas yang diperdagangkan, antara lain, mencakup aneka pangan olahan, beras, aneka cabai dan bawang, telur dan daging ayam ras, daging sapi, serta aneka sayur. Ke depan, penguatan KAD masih dapat ditingkatkan melalui optimalisasi BUMD pangan, sinergi dengan fasilitas kebijakan pemerintah, seperti tol laut dan jembatan udara (fasilitas subsidi angkutan udara kargo) oleh Kementerian Perhubungan terutama untuk daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP).

Capaian program digitalisasi oleh KPwDN dalam rangka GNPIP juga melebihi dari target yang ditetapkan. Sampai dengan 30 Desember 2022, capaian target digitalisasi sebesar 104,3% dengan pelaksanaan sebanyak 48 program di 40 KPwDN. Tantangan utama dalam implementasi program

digitalisasi, antara lain, masih rendahnya literasi digital petani sehingga memerlukan pendampingan yang intensif, biaya yang cukup mahal, dan ketersediaan infrastruktur teknologi pendukung. Sementara itu, target program penyaluran alsintan dan saprotan serta program koordinasi dan komunikasi masing-masing mencapai 250% dan 223,5% dari targetnya. Sebanyak 45 KPwDN telah menyalurkan sebanyak Rp32,21 miliar untuk penyediaan alsintan dan saprotan dalam rangka pengembangan kluster pangan. Pada program koordinasi dan komunikasi, telah dilaksanakan sebanyak 152 HLM di 33 KPwDN. Pada triwulan III 2022, tema HLM TPID mencakup risiko inflasi *volatile food* (VF), isu kelangkaan pangan, serta sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan daerah. Selain itu, topik yang dibahas, antara lain, mencakup dampak penyesuaian BBM bersubsidi dan risiko kenaikan inflasi akibat kondisi global. Sebagai mitigasi risiko, sejumlah rekomendasi telah dihasilkan, antara lain, pentingnya penyelenggaraan GNPIP, penyaluran bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), optimalisasi BTT dan Dana Insentif Daerah (DID) untuk pengendalian inflasi, sidak pasar, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.